ANALISIS FUNGSI SERTIFIKAT TANAH KEPEMILIKAN DALAM MENINGKATKAN SISTEM PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI KABUPATEN PIDIE

M. Firjatullah Tona⁽¹⁾, Suhaibah⁽²⁾, Al-Muttaqien⁽³⁾

^{1, 2, 3} Fakultas Hukum, Universitas Jabal Ghafur

firjatullahtona@gmail.com¹, suhaibah@unigha.ac.id², al-muttaqien@unigha.ac.id³

*Corresponding author email: suhaibah@unigha.ac.id

Abstrak

Meskipun pemerintah telah meluncurkan program untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengentaskan kemiskinan, diantaranya melalui sertifikasi tanah. Namun, program sertifikasi tanah tidak dapat secara langsung dapat meningkatkan kesejahteraan dan mengentaskan kemiskinan masyarakat Kabupaten Pidie secara instan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis fungsi sertifikat tanah kepemilikan dalam meningkatkan sistem perekonomian masyarakat di Kabupaten Pidie, hambatan masyarakat dalam pendaftaran sertifikat tanah kepemilikan, dan upaya yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Pidie dalam menghadapi hambatan terhadap penyelenggaraan sertifikat tanah kepemilikan. Sertifikat tanah kepemilikan memiliki beberapa fungsi yang dapat meningkatkan sistem perekonomian masyarakat. Melalui fungsi tersebut, sertifikat tanah kepemilikan dapat berperan penting dalam meningkatkan sistem perekonomian masyarakat di Kabupaten Pidie dengan menciptakan stabilitas hukum, meningkatkan akses ke modal, mendorong investasi, dan meningkatkan nilai aset serta akses ke program pemerintah Kabupaten Pidie. Hambatan yang sering dihadapi masyarakat Kabupaten Pidie dalam pendaftaran sertifikat tanah kepemilikan, antara lain: ketidakpahaman tentang proses, biaya dan birokrasi yang tinggi, konflik kepemilikan, dokumen tidak valid, lambatnya proses administrasi, dan ketidakpercayaan terhadap lembaga Pemerintah. Upaya Badan Pertanahan Kabupaten Pidie dalam menghadapi hambatan terhadap penyelenggaraan sertifikat tanah kepemilikan, antara lain: peningkatan sosialisasi, revisi kebijakan dan prosedur, pemberian subsidi, kolaborasi dengan pihak terkait, peningkatan kapasitas dan kecepatan pelayanan, dan penanganan sengketa kepemilikan.

Kata Kunci: Fungsi, Sertifikat Tanah Kepemilikan, dan Perekonomian Masyarakat

Abstract

Although the government has launched programs to improve welfare and alleviate poverty, including through land certification. However, the land certification program cannot instantly increase the welfare and alleviate poverty of the people of Pidie Regency. In this study the authors used empirical legal research methods. This study aims to determine the analysis of the function of land ownership certificates in improving the economic system of the people in Pidie Regency, community barriers in registering land ownership certificates, and the efforts made by the Land Agency of Pidie Regency in dealing with obstacles to the implementation of land ownership certificates. Land ownership certificates have several functions that can improve the community's economic system. Through this function, land ownership certificates can play an important role in improving the economic system of the people in Pidie Regency by creating legal stability, increasing access to capital, encouraging investment, and increasing asset value and access to Pidie Regency government programs. The obstacles that are often faced by the people of Pidie Regency in registering land ownership certificates include: lack of understanding of the process, high costs and bureaucracy, ownership conflicts, invalid documents, slow administrative processes, and distrust of government institutions. The efforts of the Pidie Regency Land Agency in dealing with obstacles to the implementation of land ownership certificates, including: increasing outreach, revising policies and procedures, providing subsidies, collaboration with related parties, increasing the capacity and speed of service, and handling ownership disputes.

Keywords: Function, Land Ownership Certificate, and Community Economy

Pendahuluan

Salah satu kegiatan ekonomi yang melibatkan tanah adalah jual beli hak atas tanah. Tanah dapat digunakan untuk pembangunan, baik infrastruktur seperti jalan, irigasi, telekomunikasi maupun di bidang pertanian, peternakan, pertambangan, perumahan sehingga saat ini tanah

menjadi komoditas yang memiliki nilai ekonomi sangat tinggi.¹ Perlunya jaminan kepastian hukum dan hak atas tanah sangat penting untuk memfasilitasi investasi dan pengembangan ekonomi, serta untuk mencegah sengketa dan konflik yang berpotensi merugikan masyarakat. Pendaftaran tanah memberikan kepastian hukum bagi para pemegang hak atas tanah juga diatur dalam pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997.² Suatu bidang tanah yang sudah bersertifikat akan bertambah nilainya dibandingkan dengan sebelum tanah tersebut belum bersertifikat.³

Program sertifikat tanah gratis yang dilakukan di Kabupaten Pidie bertujuan untuk memberikan sertifikat tanah secara gratis kepada masyarakat Kabupaten Pidie yang belum memiliki sertifikat tanah. Selain itu, program sertifikat tanah gratis juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat penerima sertifikat tanah. Dengan adanya sertifikat, kepemilikan tanah menjadi lebih jelas dan tercatat secara resmi. Sehingga, jika terjadi sengketa antara dua pihak mengenai kepemilikan tanah, maka sertifikat tersebut dapat dijadikan sebagai bukti dan acuan yang sah dalam penyelesaian sengketa.

Meskipun pemerintah telah meluncurkan program untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengentaskan kemiskinan, diantaranya melalui sertifikasi tanah. Namun, program sertifikasi tanah tidak dapat secara langsung meningkatkan kesejahteraan dan mengentaskan kemiskinan masyarakat Kabupaten Pidie secara instan. Hal ini dapat dilihat dari indikator makro, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pidie sebesar minus 0.14 persen, TPT sebesar 6.45 persen, IPM sebesar 70.63 persen dan persentase penduduk miskin sebesar 19.23 persen pada tahun 2020. Berdasarkan latar belakang diatas, menarik minat penulis untuk mengkaji dalam sebuah penelitian yang berjudul "Analisis Fungsi Sertifikat Tanah Kepemilikan Dalam Meningkatkan Sistem Perekonomian Masyarakat Di Kabupaten Pidie".

Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum *empiris atau socio legal research* dengan pendekatan non-doktrinal, yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat.⁴ Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum empiris karena yang menjadi objek penelitian yaitu "Analisis Fungsi Sertifikat Tanah Kepemilikan Dalam Meningkatkan Sistem Perekonomian Masyarakat Di Kabupaten Pidie".

Pembahasan

A. Analisis Fungsi Sertifikat Tanah Kepemilikan Dalam Meningkatkan Sistem Perekonomian Masyarakat Di Kabupaten Pidie

Sertifikat tanah kepemilikan memiliki beberapa fungsi yang dapat meningkatkan sistem perekonomian masyarakat, analisis fungsi sertifikat tanah kepemilikan dalam meningkatkan sistem perekonomian masyarakat di Kabupaten Pidie, antara lain sebagai berikut:

1) Kejelasan kepemilikan tanah.

Sertifikat tanah memberikan bukti hukum yang jelas tentang kepemilikan tanah, mengurangi konflik dan sengketa yang berpotensi mengganggu aktivitas perekonomian masyarakat di Kabupaten Pidie.

¹ Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 1

² Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Kencana Prenamedia Grup, 2010, hlm. 16.

³ Mardiana, et al. 2016. 'Pengaruh Sertifikasi Tanah Terhadap Nilai Tanah Dan Kondisi Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Sukoharjo', 2 (3), pp. 304–311.

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2014, hlm.52

- 2) Memperkuat akses ke kredit.
Dengan sertifikat tanah sebagai jaminan, masyarakat Kabupaten Pidie dapat lebih mudah mengakses kredit dari lembaga keuangan. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengembangkan usaha, memperluas pertanian, atau meningkatkan kapasitas ekonomi lainnya.
- 3) Mendorong investasi.
Kejelasan kepemilikan tanah melalui sertifikat dapat menarik investor untuk berinvestasi di Kabupaten Pidie. Investor akan merasa lebih yakin dan terlindungi secara hukum dalam melakukan usaha atau proyek di Kabupaten Pidie, yang pada gilirannya dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan sistem perekonomian masyarakat di Kabupaten Pidie.
- 4) Peningkatan nilai aset.
Sertifikat tanah memberikan kepastian hukum dan keamanan bagi masyarakat di Kabupaten Pidie. Dengan demikian, nilai aset tanah dapat meningkat seiring dengan meningkatnya kepercayaan investor dan pemangku kepentingan lainnya.
- 5) Peningkatan akses ke program pemerintah.
Dalam rangka meningkatkan sistem perekonomian, pemerintah Kabupaten Pidie seringkali memberikan program dan bantuan kepada masyarakat Kabupaten Pidie. Sertifikat tanah menjadi persyaratan penting untuk mengakses program-program tersebut, seperti program bantuan pertanian atau subsidi perumahan.
Dengan demikian, melalui fungsi-fungsi tersebut, sertifikat tanah kepemilikan dapat berperan penting dalam meningkatkan sistem perekonomian masyarakat di Kabupaten Pidie dengan menciptakan stabilitas hukum, meningkatkan akses ke modal, mendorong investasi, dan meningkatkan nilai aset serta akses ke program pemerintah Kabupaten Pidie.

B. Hambatan Masyarakat Dalam Pendaftaran Sertifikat Tanah Kepemilikan Untuk Meningkatkan Sistem Perekonomian Di Kabupaten Pidie

Sertifikat tanah berperan penting dalam meningkatkan sistem perekonomian yang stabil dan berkelanjutan di Kabupaten Pidie. Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa hambatan yang sering dihadapi masyarakat Kabupaten Pidie dalam pendaftaran sertifikat tanah kepemilikan untuk meningkatkan sistem perekonomian, antara lain:

- 1) Ketidapahaman tentang proses.
Banyak masyarakat yang tidak memahami prosedur dan persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran sertifikat tanah. Kurangnya pengetahuan masyarakat Kabupaten Pidie dapat menghambat mereka untuk mengikuti proses pendaftaran dengan benar dan tepat waktu.
- 2) Biaya dan birokrasi yang tinggi.
Proses pendaftaran sertifikat tanah dapat melibatkan biaya yang signifikan, seperti biaya pengukuran, pemetaan, dan administrasi. Selain itu, proses birokrasi yang rumit dan lambat juga dapat menjadi hambatan dalam mendapatkan sertifikat tanah.
- 3) Konflik kepemilikan.
Terkadang terdapat konflik atau sengketa kepemilikan tanah di antara masyarakat Kabupaten Pidie. Hal ini dapat menyebabkan hambatan dalam proses pendaftaran sertifikat tanah kepemilikan, karena perlu dilakukan klarifikasi kepemilikan yang memakan waktu dan sumber daya.
- 4) Dokumen yang tidak lengkap atau tidak valid.
Pendaftaran sertifikat tanah kepemilikan memerlukan dokumen-dokumen pendukung yang lengkap dan valid, seperti surat-surat tanah, bukti kepemilikan sebelumnya, dan dokumen identitas. Jika dokumen-dokumen tersebut tidak lengkap atau tidak valid,

proses pendaftaran bisa terhambat.

5) Lambatnya proses administrasi.

Proses administrasi di Badan Pertanahan Kabupaten Pidie atau lembaga terkait seringkali membutuhkan waktu yang lama. Lambatnya proses ini dapat menyulitkan masyarakat Kabupaten Pidie dalam mendapatkan sertifikat tanah kepemilikan dengan cepat dan efisien.

6) Ketidakpercayaan terhadap lembaga Pemerintah.

Beberapa masyarakat mungkin memiliki ketidakpercayaan terhadap lembaga Pemerintah Kabupaten Pidie yang bertanggung jawab atas pendaftaran sertifikat tanah atau dalam hal ini yaitu Badan Pertanahan Kabupaten Pidie. Hal ini dapat menghambat masyarakat Kabupaten Pidie untuk mengajukan permohonan atau bekerja sama dengan Badan Pertanahan Kabupaten Pidie.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, perlu dilakukan upaya edukasi kepada masyarakat Kabupaten Pidie tentang proses pendaftaran sertifikat tanah kepemilikan dan keuntungan yang didapat. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Pidie juga dapat mengadopsi kebijakan yang mendukung, seperti mengurangi biaya administrasi, menyederhanakan proses, dan meningkatkan efisiensi dalam pendaftaran sertifikat tanah kepemilikan pada Badan Pertanahan Kabupaten Pidie.

C. Upaya yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Pidie Dalam Menghadapi Hambatan Terhadap Penyelenggaraan Sertifikat Tanah Kepemilikan

Badan Pertanahan atau lembaga terkait memiliki peran penting dalam menghadapi hambatan terhadap penyelenggaraan sertifikat tanah kepemilikan. Dalam menghadapi hambatan terhadap penyelenggaraan sertifikat tanah kepemilikan di Kabupaten Pidie, Badan Pertanahan Kabupaten Pidie dapat melakukan beberapa upaya, antara lain sebagai berikut:

1) Peningkatan sosialisasi dan edukasi.

Badan Pertanahan Kabupaten Pidie dapat melakukan kampanye sosialisasi yang intensif kepada masyarakat Kabupaten Pidie untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya sertifikat tanah dan proses pendaftarannya. Edukasi ini dilakukan melalui seminar, lokakarya, sosialisasi di media massa, dan program komunikasi yang efektif.

2) Merevisi kebijakan dan prosedur.

Badan Pertanahan Kabupaten Pidie dapat merevisi kebijakan dan prosedur terkait pendaftaran sertifikat tanah kepemilikan untuk mempermudah dan menyederhanakan proses pendaftaran tanah kepemilikan. Dalam hal ini Badan Pertanahan Kabupaten Pidie dapat melibatkan pengurangan birokrasi, penggunaan teknologi informasi yang lebih efisien, dan peningkatan keterbukaan data tanah.

3) Pemberian subsidi atau bantuan.

Badan Pertanahan Kabupaten Pidie dapat memberikan subsidi atau bantuan kepada masyarakat Kabupaten Pidie yang tidak mampu secara finansial untuk membayar biaya pendaftaran sertifikat tanah kepemilikan. Hal ini dapat mendorong partisipasi masyarakat Kabupaten Pidie yang lebih luas dalam program pendaftaran tanah kepemilikan.

4) Kolaborasi dengan pihak terkait.

Badan Pertanahan Kabupaten Pidie dapat menjalin kerjasama dengan lembaga keuangan, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga pemerintah Kabupaten Pidie lainnya untuk memfasilitasi akses ke kredit atau pendanaan bagi masyarakat Kabupaten Pidie dalam pendaftaran sertifikat tanah kepemilikan.

5) Peningkatan kapasitas dan kecepatan pelayanan.

Badan Pertanahan Kabupaten Pidie dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi informasinya untuk meningkatkan kecepatan dan efisiensi

pelayanan pendaftaran tanah kepemilikan kepada masyarakat Kabupaten Pidie. Hal ini dapat meliputi pelatihan pegawai, perbaikan sistem informasi, dan penggunaan teknologi canggih seperti sistem pendaftaran tanah kepemilikan secara online.

6) Penanganan sengketa kepemilikan.

Badan Pertanahan Kabupaten Pidie dapat memberikan mekanisme yang efektif dan adil dalam menangani sengketa kepemilikan tanah. Hal ini dilakukan dengan melibatkan penyelesaian sengketa melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan tanah yang cepat dan efisien.

Melalui upaya-upaya tersebut, Badan Pertanahan Kabupaten Pidie dapat mengatasi hambatan-hambatan yang terkait dengan penyelenggaraan sertifikat tanah kepemilikan. Dengan demikian, proses pendaftaran sertifikat tanah kepemilikan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan masyarakat Kabupaten Pidie dapat lebih mudah mengakses dan memperoleh sertifikat tanah kepemilikan yang penting untuk meningkatkan kepastian hukum dan meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Pidie.

Kesimpulan

1. Sertifikat tanah kepemilikan memiliki beberapa fungsi yang dapat meningkatkan sistem perekonomian masyarakat. Melalui fungsi tersebut, sertifikat tanah kepemilikan dapat berperan penting dalam meningkatkan sistem perekonomian masyarakat di Kabupaten Pidie dengan menciptakan stabilitas hukum, meningkatkan akses ke modal, mendorong investasi, dan meningkatkan nilai aset serta akses ke program pemerintah Kabupaten Pidie.
2. Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa hambatan yang sering dihadapi masyarakat Kabupaten Pidie dalam pendaftaran sertifikat tanah kepemilikan untuk meningkatkan sistem perekonomian, antara lain:
 - 1) Ketidapahaman tentang proses;
 - 2) Biaya dan birokrasi yang tinggi;
 - 3) Konflik kepemilikan;
 - 4) Dokumen yang tidak lengkap atau tidak valid;
 - 5) Lambatnya proses administrasi;
 - 6) Ketidakpercayaan terhadap lembaga Pemerintah.
3. Badan Pertanahan atau lembaga terkait memiliki peran penting dalam menghadapi hambatan terhadap penyelenggaraan sertifikat tanah kepemilikan. Dalam menghadapi hambatan terhadap penyelenggaraan sertifikat tanah kepemilikan di Kabupaten Pidie, Badan Pertanahan Kabupaten Pidie dapat melakukan beberapa upaya, antara lain sebagai berikut:
 - 1) Peningkatan sosialisasi dan edukasi;
 - 2) Merevisi kebijakan dan prosedur;
 - 3) Pemberian subsidi atau bantuan;
 - 4) Kolaborasi dengan pihak terkait;
 - 5) Peningkatan kapasitas dan kecepatan pelayanan;
 - 6) Penanganan sengketa kepemilikan.

Referensi

Buku

- Arba, H.M. 2017. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arie Sukanti Hutagalung. 2012. *Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Arisaputra, Muhammad Ilham. 2015. *Reforma Agraria Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Sunggono. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Chomzah, Ali Achmad. 2002. *Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan I Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Seri Hukum Pertanahan II Sertipikat dan Permasalahannya*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Darman, Flavianus. 2009. *Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah*. Jakarta: Transmedia Pustaka.
- Harsono, Boedi. 2008. *Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*. Jakarta: Djambatan.
- Ishaq. 2014. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo.
- Lubis, Mhd. Yamin dan Rahim Lubis. 2010. *Hukum Pendaftaran Tanah*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. 2007. *Metode Penulisan Hukum*. Fakultas Hukum UMY. Yogyakarta: Komunika.
- Parlindungan, A.P. 2002. *Komentor Atas Undang-Undang Pokok Agraria*. Bandung: Mandar Maju.
- Samun Ismaya. 2013. *Hukum Administrasi Pertanahan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Santoso, Urip. 2010. *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*. Jakarta: Kencan.
- Salim HS. 2016. *Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sembiring Julius. 2016. *Tanah Negara*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soehendera Djaka. 2010. *Hukum Agraria dan Masyarakat di Indonesia: Studi tentang Tanah, Kekayaan Alam dan Ruang di Masa Kolonial dan Desentralisasi*. Jakarta: Huma Jakarta.
- Supriadi. 2012. *Hukum Agraria*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutedi, Adrian. 2007. *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Waskito, Arnowo Hadi. 2017. *Pertanahan, Agraria dan Tata Ruang*. Jakarta: Balebat Dedikasi Prima.

Dokumen Lain

- Amir, A. 2008. *Analisis Dampak Program Sertifikasi Tanah Terhadap Akses Kredit Perbankan dan Peningkatan Pendapatan Petani di Kabupaten Bekasi*. Institut Pertanian Bogor.
- H. Arifin Bur ddk., “Sertifikat Sebagai Alat Pembuktian Yang Kuat Dalam Hubungannya Dengan Sistem Pbulikasi Pendaftaran Tanah”, Uin Law Review, Vol. 01, No. 02, Oktober 2017.
- Klaudius Ilkam Hulu, “Kekuatan Alat Bukti Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Dalam Bukti Kepemilikan Hak”, Jurnal Panah Keadilan, Vol. 1, No.1, Februari-Juli 2021.
- Mardiana, Y. S., Siregar, H. dan Juanda, B. 2016. ‘Pengaruh Sertifikasi Tanah Terhadap Nilai Tanah Dan Kondisi Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Sukoharjo’, Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen, 2(3), pp. 304–311.
- Moh. Indra Bangsawan. 2019. *Kebijakan Sertifikasi Tanah Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*. Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Rezeki Aldila Rajab ddk., “Sertifikat Hak Atas Tanah Dalam Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah”, Jurnal Notarius, Vol. 13, No. 2, 2020.
- T. Ahmad Denanda, Abdurrahman, “Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali Secara Sporadik Di Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya, Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol. 5, No. 1, Februari 2021.

Dokumen Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang pendaftaran tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1960 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No.12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Intruksi Presiden No.2 tahun 2018 tentang Percepatan Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Indonesia.

Perpres Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah